

**PENGARUH *ABILITY*, *LEGITIMACY*, DAN *ACCEPTANCE* TERHADAP
EFEKTIVITAS *PERFORMANCE BASED BUDGETING***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**LENI KUSNUL QOTIMAH
NIM. 17.52.21.013**

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2021**

**PENGARUH *ABILITY, LEGITIMACY, DAN ACCEPTANCE* TERHADAP
EFEKTIVITAS *PERFORMANCE BASED BUDGETING***

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
LENI KUSNUL QOTIMAH
NIM. 17.52.21.013**

Surakarta, 20 April 2021

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



**Wahyu Pramesti., S.E., M.Si.,Ak
NIP. 19871007 201403 2 004**

SURAT PERNYAAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LENI KUSNUL QOTIMAH

NIM : 175221013

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Pengaruh Ability, Legitimacy, dan Acceptance Terhadap Efektivitas Performance Based Budgeting”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 April 2021



Leni Kusnul Qotimah

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LENI KUSNUL QOTIMAH

NIM : 175221013

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Ability, Legitimacy, dan Acceptance Terhadap Efektivitas Performance Based Budgeting”**.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari Satuan Kerja (Satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 April 2021



Leni Kusnul Qotimah

Wahyu Pramesti, S.E., M.Si., Ak.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Leni Kusnul Qotimah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa telah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Saudara Leni Kusnul Qotimah NIM: 175221013 yang berjudul:

*PENGARUH ABILITY, LEGITIMACY, DAN ACCEPTANCE
TERHADAP EFEKTIVITAS PERFORMANCE BASED BUDGETING.*

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 April 2021
Dosen Pembimbing Skripsi



Wahyu Pramesti., S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19871007 201403 2 004

PENGESAHAN

**PENGARUH ABILITY, LEGITIMACY, DAN ACCEPTANCE TERHADAP
EFEKTEVITAS PERFORMANCE BASED BUDGETING**

Oleh :

LENI KUSNUL QOTIMAH
NIM. 17.52.21.013

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 / 23 Ramadan 1442 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Fitri Laela Wijayati, SE, M.Si.
NIP. 19860625 201403 2 001



Penguji II
Usnan, S.E.I., M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001



Penguji III
Ronnawan Juniatmoko, S.Pd., M.Si.
NIP. 1990607 201903 1 011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QA. Al-Insyirah: 6-8)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

(Andrew Jacson)

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.”

(Hamka)

“Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan tetap semangat. Percayalah, semua akan baik-baik saja jika kita mau melibatkan Allah dalam urusan kita.”

(penulis)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT berkat rahmat dan kuasa-Nya karya ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, karya ilmiah sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sarita dan Ibu Susilaningih tercinta atas segala doa, nasihat, pengorbanan dan kasih sayang tak terhingga.
2. Kakakku tersayang, Ambar Puspita Sari dan suaminya yang selalu mendukung penulis. Adikku tersayang, Ihsan Al-huda dan Mustakim Salis Asidik yang selalu menyemangatiku.
3. Segenap keluarga yang selalu membuatku semangat dan selalu mendoakan aku.
4. Sahabatku Dina Muslikhah, Nur Hidayati, Risna, Triwi, Puput, Kiki, dan Safira, yang selalu memberikan *support* dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-temanku di kelas A dan kelas professional C Akuntansi Syariah angkatan 2017 yang saling mendukung dan memberikan motivasi.
6. Almamater tercinta IAIN Surakarta.

Terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Ability*, *Legitimacy* dan *Acceptance* Terhadap Efektivitas *Performance Based Budgeting*”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. Mohammad Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati, S.E., M.Si., Ak., Kepala Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ade Setiawan.,M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Wahyu Pramesti, S.E., M.Si., Ak., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Satuan Kerja (Satker) di lingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Klaten yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Sarita dan Ibu Susilaningih terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya. Serta kakakku Ambar dan adikku Mustakim dan Ihsan yang selalu memberikan *support* dan perhatian kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku, team bala-bala tersayang, terima kasih sudah menjadi teman baikku, yang mengiangkatku dan yang mau direpotkan serta selalu memotivasi penulis.
10. Teman-teman Akuntansi Syariah A dan kelas professional C angkatan 2017.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penyelesaian skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya , hanya dia serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta,.....2021

Penulis

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of ability, legitimacy, and support on the effectiveness of performance-based budgets. The population of this study were structural officials in work units in the Klaten State Treasury Service Office. Sampling using purposive sampling technique obtained a sample of 54 respondents. This type of research is quantitative research. The analytical tool used is SPSS 25.

The results showed that ability, legitimacy, and acceptance had a significant positive effect on the effectiveness of performance-based budgeting simultaneously. Meanwhile, legitimacy have no significant effect on performance based budgeting partially.

Keywords: *Ability, legitimacy, acceptance, Performance Based Budget.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan, legitimasi, dan dukungan terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja. Populasi dari penelitian ini adalah para pejabat struktural pada Satuan kerja (Satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yang diperoleh sampel sebanyak 54 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ability*, *legitimacy*, dan *acceptance* berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* secara simultan. Sedangkan secara parsial, *legitimacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *performance based budgeting*.

Kata kunci: Kemampuan, otoritas, Dukungan, Anggaran Berbasis Kinerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYAAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRAC</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Jadwal penelitian	8
1.8 Sistematika Penulis Skripsi	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Teori.....	10

2.1.1	<i>Performance Based Budgeting</i>	10
2.1.2	<i>Ability</i>	12
2.1.3	<i>Legitimacy</i>	15
2.1.4	<i>Acceptance</i>	16
2.2	Hasil Penelitian yang Relevan.....	18
2.3	Kerangka Berfikir.....	22
2.4	Hipotesis.....	23
2.4.1	Pengaruh <i>Ability</i> terhadap efektivitas <i>Performance based budgeting</i>	23
2.4.2	Pengaruh <i>Legitimacy</i> terhadap efektivitas <i>Performance based budgeting</i>	24
2.4.3	Pengaruh <i>Acceptance</i> terhadap efektivitas <i>Performance based budgeting</i>	25
BAB III METODOLOGI		27
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian.....	27
3.2	Jenis Penelitian	27
3.3	Populasi dan Sampel.....	27
3.3.1	Populasi	27
3.3.2	Sampel.....	28
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	28
3.5	Data dan Sumber Data.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data	29
3.7	Variabel Penelitian	29
3.8	Definisi Operasional Variabel	30
3.9	Teknik Analisis Data	31

3.9.1	Statistik Deskriptif.....	32
3.9.2	Uji Instrumen Penelitian.....	32
3.9.3	Uji Asumsi Klasik	33
3.9.4	Uji Kelayakan Model	34
3.9.5	Analisis Regresi Linier Berganda	34
3.9.6	Uji Hipotesis.....	35
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Penelitian	36
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	40
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	40
4.2.2	Uji Instrumen Penelitian.....	41
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	44
4.2.4	Uji Kelayakan Model	47
4.2.5	Analisis Regresi Linier Berganda	48
4.2.6	Pengujian Hipotesis.....	50
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data	51
4.3.1	Pengaruh Ability terhadap Performance Based Budgeting.....	51
4.3.2	Pengaruh Legitimacy terhadap Performance Based Budgeting	53
4.3.3	Pengaruh Acceptance terhadap Performance Based Budgeting	56
BAB V PENUTUP.....		58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.3	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		64

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 4. 1 Data Penyebaran Kuisisioner.....	37
Tabel 4. 2 Demografi Responden.....	38
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	40
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas.....	42
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolonieritas	45
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedasitas	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	47
Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi Simultan	47
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
Tabel 4. 12 Hasil Uji Hipotesis	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	23
-------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	64
Lampiran 2 : Kuesioner.....	66
Lampiran 3 : Daftar Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Klaten	71
Lampiran 4 : Data Penelitian.....	78
Lampiran 5: Hasil Olah Data SPSS 25	84
Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian	91
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.....	92
Lampiran 8 : Bukti Plagiasi.....	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi sistem pengelolaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government* di bidang Keuangan Negara. Periode 2003 sampai sekarang merupakan reformasi lanjutan dengan diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Rahmayati, 104:2019).

Kinerja pemerintah sebagai orientasi utama syarat Paket Undang-Undang Keuangan Negara dalam melaksanakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada hasil program yang telah ditetapkan (*outcome*) secara efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya Undang-Undang tersebut terjadi perubahan pendekatan anggaran yakni pendekatan anggaran berbasis *input* (tradisional) menjadi pendekatan anggaran berbasis kinerja atau *Performance based budgeting* (Rizaldi, 2016).

Wujud dari reformasi manajemen keuangan dan penganggaran adalah penerapan tiga pilar pendekatan penyusunan anggaran yang meliputi penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*), penganggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term*

Expenditure Framework). Tiga pilar tersebut menjadi acuan untuk merancang dan menyusun anggaran, namun *Performance based budgeting* merupakan pendekatan utama karena pendekatan tersebut fokus pada *output* dan *outcome* dari program kerja tertentu (Madjid & Ashari, 2013).

Sistem anggaran sebelumnya yakni pendekatan anggaran tradisional merupakan anggaran yang hanya mengendalikan tata kelola (*input*) serta menilai keberhasilan (*output*) guna melihat jumlah nominal yang *efisien* dengan perencanaan sebelumnya. Sedangkan, pendekatan *Performance based budgeting* bertujuan untuk mengutamakan *input* dan *output* serta pencapaian tujuan (*outcome*) yang didapat sesuai visi dan misi perencanaan anggaran (Liwaul, Rosika, Purwanti, dan Hamryati, 2017).

Penerapan pendekatan *performance based budgeting* sudah diterapkan pemerintah sejak tahun anggaran 2005, namun hingga saat ini penerapan *performance based budgeting* belum optimal. Hal ini disebabkan karena dalam penyusunan RPJMN dan Renstra K/L belum menggunakan kapasitas fiskal, tingkat operasional masih mempertanyakan keterkaitan dokumen perencanaan dan anggaran, program kegiatan belum digunakan untuk menilai kualitas efektivitas capaian tujuan pembangunan nasional, efisiensi belanja serta akuntabilitas kinerja satuan kerja (Prasetya, 2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan bahwa masih banyak catatan yang harus diperbaiki pada sistem anggaran, dari catatan tersebut untuk memperbaiki kekurangan sistem yang ada maka akan dilakukan beberapa perubahan sehingga dapat mencapai anggaran yang optimal, dapat

dipertanggungjawabkan dan selaras dengan visi presiden. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja (23/06/2020) dengan komisi XI DPR, Menteri Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengemukakan Redesain Sistem Penganggaran (fiskal.kemenkeu.go.id).

Permasalahan yang muncul saat ini adalah program belanja pusat dan daerah tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya belum optimal, dokumen perencanaan dan penganggaran berbeda dan tidak bisa dikonsolidasi, informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik, rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak secara langsung atau bersifat *normatif* sehingga sulit untuk menghubungkan *output* dan *outcome* dengan penganggarnya (www.dpr.go.id).

Kepala MSKI KPPN Klaten Hary Sutrasno menyampaikan tujuan dari Redesain Sistem Penganggaran yakni agar perencanaan dan penganggaran tepat sasaran dan fleksibel dalam penguatan penerapan *performance based budgeting* serta menjadi upaya *familiarization* atas dokumen anggaran kepada publik sebagai peningkatan akuntabilitas publik. Redesain Sistem Penganggaran akan memberikan manfaat salah satunya terjadi sinergi antara eselon I lintas kementerian dan pemerintah pusat atau daerah dan tidak akan terjadi *overlapping* kegiatan (djpb.kemenkeu.go.id).

Menurut Sriharioto dan Wardhani (2012), permasalahan yang kerap terjadi pada satuan kerja kementerian atau lembaga dalam praktik *performance based budgeting* yaitu sering adanya keterlambatan penyerapan anggaran yang menyebabkan *performance based budgeting* dikatakan belum optimal. Pemegang

otoritas Bendahara Umum Negara (BUN) yakni Perbendaharaan Kementerian Keuangan, telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara optimal dan lebih baik dengan melakukan pengukuran kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 bahwa IKPA adalah suatu indikator yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian atau Lembaga dari sisi perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu indikator IKPA yaitu penyerapan anggaran, karena dengan tingkat penyerapan anggaran dapat melihat gambaran kinerja kementerian atau lembaga dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap program yang direncanakan.

Evaluasi penyerapan anggaran untuk Satker di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten pada akhir tahun anggaran 2018, tercatat realisasi anggaran sebesar Rp1.981.534.248.555. Artinya, akhir tahun anggaran 2018 terealisasi 94,33% dari pagu Rp2.073.229.746.000. Terjadi penurunan realisasi anggaran tahun anggaran 2019, tercatat realisasi anggaran sebesar Rp1.929.000.000.000 lebih. Artinya, akhir tahun anggaran 2019 hanya terealisasi 88,60% dari pagu Rp2.177.000.000.000.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2020, realisasi anggaran sampai bulan November 2020 baru terserap 76,66% dari pagu Rp2.178.137.521.000 dengan realisasi anggaran Rp1.669.794.10.969, sehingga sisa dana belanja satuan kerja di

wilayah kerja KPPN Klaten sebesar Rp508.343.411.031 diharapkan dapat terserap sampai dengan akhir tahun 2020.

Performance based budgeting dikatakan optimal jika tingkat penyerapan dan pencapaian *output* anggaran minimal 95% pada akhir tahun anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran, 15:2018). Semakin cepat penyerapan anggaran, maka semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta mempercepat realisasi kegiatan. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat penyerapan anggaran maka akan ada dana yang menganggur (*idle money*) atau dikatakan dana tersebut tidak produktif yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat (Fahlevi dan Ananta, 2015).

Dilihat dari evaluasi IKPA KPPN Klaten, pada tahun anggaran 2019 terdapat 2 unsur yang masih perlu di dorong dan dapat lebih baik lagi untuk tahun anggaran selanjutnya yaitu tingkat kesalahan dokumen SPM dengan nilai rata-rata 70 (dari skala 100). Unsur kedua yaitu revisi kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi pada halaman III DIPA dengan nilai 69,29 (dari skala 100). Sedangkan untuk tahun anggaran 2020, evaluasi IKPA secara umum IKPA satuan kerja cenderung turun. Pandemi Covid-19 mengakibatkan relokasi dan relaksasi anggaran (djpb.kemenkeu.go.id).

Sedangkan dilihat dari segi sumber daya manusia, KPPN Klaten yang berperan sebagai kuasa Bendaharan Umum Negara tidak seperti KPPN di kota besar yang memiliki satker dengan kemampuan yang cakap teknologi dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Satker di lingkup kerja KPPN Klaten sebagian besar adalah dari sekolah-sekolah yang bertempat tinggal di daerah terpencil di kota

Klaten dan Boyolali. Oleh karena itu, SDM yang dimiliki tidak sebaik SDM di kota besar.

KPPN Klaten menyadari bahwa penerapan *performance based budgeting* dan sistem yang baru perlu upaya pendampingan kepada setiap satuan kerja pengelola APBN agar tujuan dan manfaatnya tercapai. Berkenaan dengan hal tersebut KPPN Klaten sejak 2007 telah menerapkan sistem layanan secara cepat, akurat, dan tanpa biaya berkomitmen membantu semua pemangku kepentingan agar sukses dalam programnya melalui layanan konsultasi, bimbingan teknis dan monitoring sebagai upaya bersama membangun dan memajukan negeri, khususnya di kabupaten Klaten dan Boyolali (djpb.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat suatu fenomena bahwa *performance based budgeting* cenderung belum optimal pada Satuan kerja (Satker) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Sehingga penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Ability, Legitimacy, dan Acceptance Terhadap Efektivitas *Performance Based Budgeting*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa *performance based budgeting* pada Satuan Kerja (Satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten cenderung belum optimal.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya hanya berfokus pada *Ability*, *Legitimacy*, dan *Acceptance* terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satuan kerja (Satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Ability* berpengaruh terhadap *Performance based budgeting*?
2. Apakah *Legitimacy* berpengaruh terhadap *Performance based budgeting*?
3. Apakah *Acceptance* berpengaruh terhadap *Performance based budgeting*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Ability* terhadap *Performance based budgeting*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Legitimacy* terhadap *Performance based budgeting*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Acceptance* terhadap *Performance based budgeting*.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penulis

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang akan datang.

4. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja. Serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kendala yang dihadapi Satuan Kerja (Satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten.

1.7 Jadwal penelitian

Terlampir.

1.8 Sistematika Penulis Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini akan menggambarkan alur penelitian dari awal hingga akhir penulisan yang terdiri dari lima bab dan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN TEORI

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi kajian teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil pengujian analisis data, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Performance Based Budgeting*

Performance Based Budgeting merupakan pendekatan anggaran yang mneutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. *Performance Based Budgeting* adalah sistem penganggaran yang berhubungan dengan pencapaian visi, misi serta rencana strategis suatu organisasi pemerintah yang berorientasi pada *output* dari kegiatan tertentu (Bastian, 2006). *Performance Based Budgeting* adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang direncanakan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan serta efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan (Halim, 2007).

Menurut Widyantoro (2009) dalam kosep dasar ilmu ekonomi, dilema yang dihadapi oleh masyarakat yaitu keterbatasan sumber dana sebagai alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan dengan kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Hal tersebut dihadapi oleh sebagian negara termasuk Indonesia. Sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efesien dan efektif. Oleh karena itu, ketika penyerapan anggaran tidak optimal dalam memenuhi target, maka telah terjadi infisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Penyerapan anggaran merupakan capaian dari suatu perkiraan yang akan dicapai selama periode tertentu (realisasi anggaran). Penyerapan anggaran pada pemerintahan atau organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama periode

tertentu (Halim, 2014). Sedangkan menurut Kuncoro (2013) penyerapan anggaran merupakan siklus anggaran dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Menurut Wiliam dan Gandhi (2010) penyerapan anggaran yang tidak optimal akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja. Karena, dana yang telah dialokasikan tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan sehingga menyebabkan dana menganggur. Oleh sebab itu, struktur *performance based budgeting* terdapat tiga komponen:

1. *Perfomance indicator* atau indikator kinerja, merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur kinerja.
2. *Standard cost analysis* yakni satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.
3. *Perfomance evaluation*, yaitu penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsisten perencanaan dan impelentasi, tingkat efisiensi, dan realisasi penyerapan anggaran.

Sistem *Performance based budgeting* menitikberatkan pada segi pelaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana, juga *outcome* akan diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari *outcome* anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Namun, Efisiensi tidak boleh mengalahkan efektifitas dan efektifitas tidak boleh menyebabkan pemborosan (BPKP, 2005).

Menurut BPKP (2005) faktor pemicu keberhasilan pendekatan *Performance based budgeting* yaitu kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, fokus menyempurnakan administrasi secara terus menerus, sumber daya yang cukup untuk menyempurnakan administrasi berupa uang, waktu dan sumber daya manusia, pemberian *reward* dan *punishment* secara jelas, keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan (*outcome*).

Sedangkan *Shah Model* (1998) memberikan kerangka kerja untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi reformasi penganggaran dan pelaksanaan biaya berdasarkan *performance based budgeting*. kerangka kerja tersebut mencakup tiga faktor yaitu *ability*, *legitimacy*, dan *acceptance*. Ketiga faktor tersebut dikenal sebagai syarat utama pendirian *performance based budgeting* dan metode penetapan biaya yang didasarkan pada kegiatan sektor publik.

2.1.2 Ability

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang artinya kuasa. Kemampuan merupakan suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Menurut Andrews (2004) kemampuan adalah potensi atau perubahan kekuatan seseorang untuk menguasai keahlian dalam mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang yang didahului dengan tanggapan terhadap tujuan.

Kegagalan dalam menerapkan suatu sistem baru biasanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas atau ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu, Andrews (2004) memberikan tiga dimensi dalam faktor *ability* yaitu:

1. Kemampuan Penilaian Kinerja (*Performance Assessment Potential*)

Kemampuan penilaian kinerja merupakan bagian yang penting dalam implementasi anggaran berbasis kinerja. Joyce (1993) menegaskan bahwa sistem ini perlu dikembangkan jika kinerja ingin digunakan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya, lembaga serta pelaporan data-data yang bukan untuk tujuan anggaran (akuntabilitas). Dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi merupakan kemampuan penilaian kinerja (Cahya, 2009).

Penilaian kinerja adalah proses yang bersifat obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis serta menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja organisasi memberikan informasi yang digunakan untuk menetapkan sasaran dan tujuan program, merencanakan program untuk mencapai tujuan, mengalokasikan sumber daya, memonitor dan mengevaluasi program serta memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja (Sadjiarto, 2000).

Andrews (2004) menjelaskan bahwa kemampuan penilaian kinerja mengacu pada pengukuran hasil dan *output* dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut harus digunakan pada proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya dan desain insentif.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (*Human Force Potential*)

Andrews (2004) menyatakan bahwa *Human Force Potential* menelaah kondisi mengenai upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang

mampu merumuskan tujuan kinerja dan menghubungkan pengguna informasi kinerja. Hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang diperlukan untuk efektivitas *performance based budgeting*.

Sumber daya adalah faktor rasional yang mengukur sejauh mana organisasi memiliki sumber daya yang relevan untuk efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Apabila terdapat sumber daya yaitu staf dan dana yang dikhususkan untuk mengembangkan, mengumpulkan serta mengevaluasi kinerja, maka akan berdampak pada pengadopsian suatu ukuran kinerja (Pradan, 2014).

Izzaty (2011), sumber daya manusia merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas anggaran berbasis kinerja dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti uang, waktu, dan orang dalam menjalankan proses anggaran berbasis kinerja. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan serta terus memperbaiki sarana dan prasarana, sehingga SDM dapat menjalankan tugasnya dan mewujudkan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan baik.

3. Kemampuan Teknis (*Technical Ability*)

Kemampuan teknis adalah kemampuan dalam mengembangkan sistem yang dapat mengumpulkan informasi kinerja serta menyediakan data base secara umum dengan format yang sesuai untuk berbagai pengguna. Basis data harus kompatibel dengan berbagai sistem lain yang memberikan dasar untuk akuntansi, pemantauan, dan palaporan. Jika data informasi kinerja dipisahkan secara teknis dari penganggaran lain dan operasi akuntansi, maka anggaran berbasis kinerja tidak menembus proses pengambilan keputusan (Andrews, 2004).

2.1.3 *Legitimacy*

Andrews (2004) faktor yang kedua dalam memengaruhi efektivitas *performance based budgeting* yaitu mekanisme otorisasi pada pemerintah (*Legitimacy*), dengan tiga dimensi sebagai berikut :

1. Otoritas Hukum (*Legal Authority*)

Apabila terjadi perbedaan antara perubahan sistem dengan hukum yang berlaku, maka perubahan tidak dapat diterapkan. Hal ini juga dialami pada penerapan anggaran berbasis kinerja, ketika beberapa landasan hukum masih mengacu pada penganggaran berbasis input (Andrews, 2004). Aturan dan hukum merupakan hal yang diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi sebagai alat pengendalian supaya kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Jika aturan dan hukum tidak berjalan dengan optimal, maka akan menyebabkan konflik kepentingan baik antara individu maupun organisasi (Rizaldi, 2016).

Madjid dan Ashari (2013) menyatakan bahwa implementasi otoritas hukum pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut, akan tergantung pada saat kebijakannya diimplementasikan. Namun berdasarkan realitas, sering terjadi kesenjangan antara kebijakan yang telah digariskan dengan implementasi atas kebijakan tersebut.

2. Otoritas Prosedural (*Procedural Authority*)

Otoritas procedural berkaitan dengan kewenangan manajer untuk mengukur kinerja. Penggunaan prosedur lama yang masih menekankan pada input dan biaya dapat menghambat pengimplementasian anggaran berbasis

kinerja (Andrews, 2004). Pengukuran kinerja dan potensi penggunaan informasi kinerja seringkali dikaitkan ke dalam proses anggaran yang ada. Proses yang ada tersebut menentukan prosedur yang bertindak sebagai aturan perilaku penganggaran yang mengikat.

3. Otoritas Organisasi (*Organizational Authority*)

Menurut Andrews (2004) pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya sangat mungkin dipengaruhi oleh otoritas politik, yang tidak memerhatikan informasi penilaian kinerja sehingga dapat mengurangi wewenang yang dimiliki organisasi. Otoritas organisasi adalah kekuatan untuk mengidentifikasi keterlibatan dirinya dengan organisasi yang bersifat relatif dengan ditandai penerimaan nilai-nilai serta tujuan dari organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan maksimal atas nama organisasi, dan memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi (Nawastri, 2015).

Menurut Mowday et al (1979), Otoritas organisasi menunjukkan loyalitas, keyakinan, dan dukungan seseorang terhadap nilai serta tujuan yang ingin dicapai organisasi. Seorang individu akan berusaha mencapai tujuan organisasi jika otoritas organisasinya kuat, serta dapat berpikiran positif dan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi organisasinya.

2.1.4 Acceptance

Faktor yang terakhir menurut Andrews (2004) yang mengembangkan faktor dari Shah (1998) yaitu *Acceptance* atau dukungan dalam menyukseskan penerapan sistem *performance based budgeting* yang baru tergantung pada cara meyakinkan

pejabat pemerintah, manajer dan pegawainya. *Acceptance* terdiri dari tiga dimensi yakni :

1. Dukungan Politik (*Political Acceptance*)

Pengukuran dan penggunaan informasi kinerja memiliki konsekuensi untuk dipilih dan diangkat. Informasi kinerja juga merupakan ancaman terhadap aspek politik dari pengambilan keputusan anggaran (apa kebijakan yang dimiliki politisi dalam menggunakan informasi kinerja?), dan meningkatkan kepadatan informasi pengambilan keputusan anggaran yakni informasi tersebut dapat membuat dokumen lebih lama dan lebih sulit dievaluasi (Andrews, 2004).

Menurut Rizaldi (2016), Pejabat politik perlu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan dari legislative dalam mengimplementasikan *performance based budgeting*. Selain itu, pejabat politik atau pemimpin organisasi perlu memastikan ketersediaan dana dan mendukung penerapan *performance based budgeting*.

2. Dukungan Administrative (*Administrative Acceptance*)

Dukungan manajer penting dalam penggunaan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial serta dalam pembuatan skema insentif. Manajer tidak menganggap bahwa *performance based budgeting* tidak akan memengaruhi keputusan masa depan atau akan lebih menyulitkan (Andrews, 2004).

Menurut Naseri (2015), manajer perlu diyakinkan bahwa mereka dapat menggunakan informasi kinerja dalam keputusan dan motivasinya. Manajer seharusnya tidak menemukan anggaran berbasis kinerja sebagai sasaran yang bisa

dipertanyakan oleh para pembuat undang-undang, serta tidak berasumsi bahwa pelaksanaan atau kurangnya implementasi modifikasi tidak mempengaruhi keputusan di masa depan.

3. Dukungan Motivasi (*Motivational Acceptance*)

Dukungan motivasi adalah dorongan dalam proses implementasi anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan sistem *reward* dan *punishment*. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai yang memuaskan atau tidak memuaskan dalam rencana yang disetujui yang menghasilkan kegagalan ataupun keberhasilan implementasi *performance based budgeting* (Andrews, 2004).

Reward merupakan salah satu metode untuk memotivasi seseorang dalam menjalankan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. *Reward* dapat diartikan sebuah bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa kepada suatu prestasi tertentu karena telah melakukan keunggulan atau berhasil melaksanakan tugas dengan baik yang biasanya berbentuk material atau ucapan (Hotdianty, 2016).

Fitri et al. (2013) menyatakan bahwa *Punishment* adalah kebalikan dari *reward*. *Punishment* sering disebut dengan sanksi yang merupakan sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku pada umumnya. Sanksi tersebut bertujuan untuk membuat semangat kerja, karena jika seseorang tidak ingin terkena sanksi maka akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan hati-hati.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *performance based budgeting* telah banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis tidak terlepas dari

penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat hasil dari penelitiannya.

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan:

Fitri et.al (2013) menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, *reward*, dan *punishment* terhadap *performance based budgeting*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, *reward*, *punishment* sementara variabel dependen yang digunakan yaitu *performance based budgeting*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian tersebut yaitu SKPD pemerintah kabupaten Lombok Barat dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, dengan kriteria pengambilan sampel yaitu pejabat struktural yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen tersebut berpengaruh signifikan. Sedangkan secara parsial, komitmen organisasi dan hukuman tidak berpengaruh dan gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan, kualitas sumber daya dan *reward* berpengaruh signifikan.

Noor Cholis Madjid dan Hasan Ashari (2013) menganalisis Implementasi *performance based budgeting* pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Variabel dependen dalam penelitian yaitu *performance based budgeting*, variabel independen yakni kelengkapan aturan, pemahaman konsep *performance based budgeting*, konsistensi penerapan pbk dan evaluasi kebijakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian tersebut yaitu penjabar pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian OTL BPPK, Kabag Keuangan BPPK, Kabag TU Pusdiklat serta para pelaksana terkait perencanaan dan penganggaran. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan, variabel independen berpengaruh signifikan, sedangkan secara parsial, variabel kelengkapan aturan, pengetahuan pelaksana dan konsistensi berpengaruh signifikan.

Naseri et.al (2015) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan *performance based budgeting* di Universitas kedokteran Iran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *performance based budgeting*, sedangkan variabel independen yakni kemampuan penilaian kinerja, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan teknis, otoritas hukum, otoritas prosedural, otoritas organisasi, dukungan politis, dukungan administratif, dan dukungan motivasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Sampel dalam penelitian ini yaitu Universitas Kedokteran di Iran dimana sistem keuangan baru diterapkan dan metode akuntansi bergeser dari akuntansi kas ke akuntansi akrual. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Universitas Ilmu Kedokteran Iran baru memenuhi kriteria otoritas hukum dan dukungan administrative.

Diapinar Reza Rizaldi (2016) menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *performance based budgeting*, sedangkan variabel independen yakni kemampuan

penilaian kinerja, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan teknis, otoritas hukum, otoritas prosedural, otoritas organisasi, dukungan politis, dukungan administrative, dan dukungan motivasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

Sampel dalam penelitian ini adalah satuan kerja yang menilai kinerja dan terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel kemampuan SDM, otoritas hukum, otoritas organisasi dan dukungan politis berpengaruh positif, kemampuan penilaian kinerja berpengaruh negatif terhadap efektivitas penerapan *performance based budgeting* pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Jakarta II. Sedangkan variabel kemampuan teknis, otoritas prosedural dan dukungan motivasi tidak cukup bukti untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Hafilah Khiasati Shabrina dan Sugih Sutrisno Putra (2020) menganalisis pengaruh *Ability*, *Legitimacy*, dan *Acceptance* terhadap Efektivitas *performance based budgeting* pada SKPD Kota Bandung. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *performance based budgeting*, sedangkan variabel independen adalah *Ability*, *Legitimacy*, dan *Acceptance*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda.

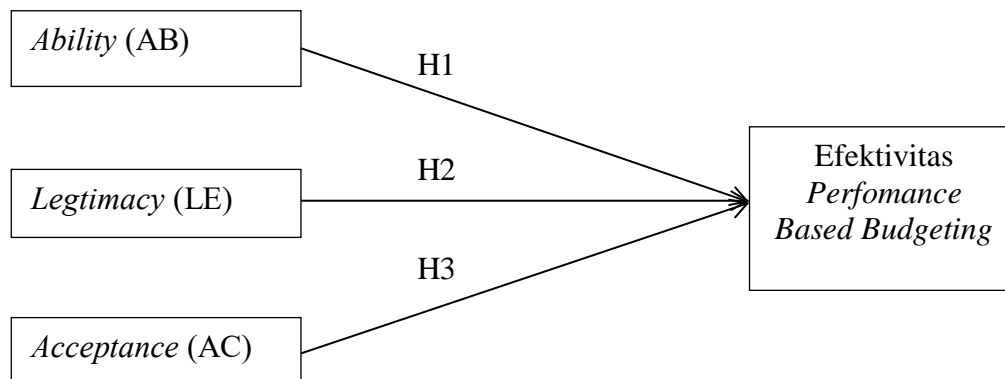
Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. sampel dalam penelitian tersebut yaitu 13 dinas yang memiliki pendapatan dan belanja di kota Bandung. Hasil penelitian ini menyatakan secara simultan *ability*, *legitimacy*, dan *acceptance* berpengaruh positif terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Sedangkan secara parsial *Ability* dan *legitimacy* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Sedangkan *acceptance* tidak signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Secara simultan *ability*, *legitimacy*, dan *acceptance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual untuk menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Ability* terhadap efektivitas *Performance based budgeting*

Dalam teori *Shah Model* (1998) faktor yang pertama dalam melaksanakan *performance based budgeting* adalah faktor kemampuan (*ability*). Umumnya, kegagalan atau keberhasilan dari setiap kegiatan atau program yang direncanakan oleh organisasi merupakan hasil dari kapasitas tinggi rendahnya atau mampu tidaknya organisasi dalam menjalankan program kerja.

Ability dalam penilaian kinerja akan mempengaruhi efektivitas *Performance based budgeting* pada setiap tingkatan. Jika penilaian kinerja digunakan untuk mempengaruhi *ability* (kemampuan sumber daya), maka harus mengembangkan data kinerja yang valid dan akurat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan (Andrews, 2004). Hal ini sesuai dengan penelitian Shabrina (2020) yang menyatakan bahwa *ability* penilaian kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas *Performance based budgeting*.

Ability SDM yang kompeten akan menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi pemerintah serta pendukung daya saing pada era globalisasi dalam

menghadapi lingkungan serta kondisi sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan yang dinamis (Putri, 2014). Sebaliknya, apabila SDM pada suatu organisasi pemerintah kurang kompeten maka pencapaian tujuan organisasi akan menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Fitri, *et al.* (2013), Madjid dan Ashari(2013), Asikin (2014), nawastri (2015), Hotdianty (2016), Rizaldi (2016), Prasetya (2018) serta Shabrina (2020) bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Menurut Willoughby dan Melkers, instansi pemerintah harus memiliki *ability* dalam mengembangkan sistem informasi untuk mengumpulkan data yang berorientasi *output* dari kegiatan atau program kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian Asikin (2014), Nawastri (2015), dan Shabrina (2020) yang menemukan bahwa sistem informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas *Performance based budgeting*.

Oleh karena itu, hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: *Ability* berpengaruh positif terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

2.4.2 Pengaruh *Legitimacy* terhadap efektivitas *Performance based budgeting*

Menurut teori *Shah Model* (1998) faktor yang kedua dalam melaksanakan *performance based budgeting* adalah otoritas (*Legitimacy*). *Legitimacy* merupakan prasyarat untuk pelaksanaan setiap sistem atau perencanaan dalam pemerintahan. Menurut Harris (2001), peraturan atau aturan hukum tentang anggaran yang belum menggunakan sistem informasi akan menyebabkan kurangnya penggunaan informasi kinerja. Hasil penelitian oleh Madjid dan Ashari (2013), Naseri (2014), Rizaldi (2016), serta Shabrina (2020) menunjukkan bahwa

dukungan dari aspek peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas *Performance based budgeting*.

Apabila otoritas prosedural penganggaran masih menggunakan pendekatan tradisional maka efektivitas *Performance based budgeting* dapat terhambat. Hal ini diungkapkan Young (2003), bahwa masih terdapat sisa-sisa pendekatan penganggaran tradisional meskipun sudah berusaha memacu penggunaan informasi kinerja. Shabrina (2020) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa otoritas prosedural berpengaruh positif terhadap efektivitas *Performance based budgeting*.

Andrews (2004) menyatakan banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi dapat menghambat penerapan *performance based budgeting*. Oleh karena itu diperlukan adanya otoritas organisasi tanpa ada pengaruh politik maupun kepentingan pribadi dan kelompok. Rizaldi (2016) dan Prasetya (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa otoritas prosedural berpengaruh positif terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: *Legitimacy* berpengaruh positif terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

2.4.3 Pengaruh *Acceptance* terhadap efektivitas *Performance based budgeting*

Menurut teori *Shah Model* (1998) faktor yang ketiga dalam efektivitas *performance based budgeting* adalah dukungan (*Acceptance*). Dalam sektor publik, anggaran sebagai alat politik dalam bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk program kegiatan tertentu

(Mardiasmo, 2002). Jika dalam pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan kepentingan politik atau prioritas yang disepakati bersama, maka akan memperlambat waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan efektivitas *performance based budgeting* tidak optimal. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Rizaldi (2016) bahwa dukungan politik berpengaruh positif terhadap efektivitas *Performance based budgeting*.

Andrews (2004) menyebutkan *administrative acceptance* merupakan dukungan manajer dalam penggunaan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan manajerial serta membuat skema insentif. Hal ini sesuai dengan penelitian Naseri (2014) yang menyatakan bahwa *administrative acceptance* berpengaruh terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Menurut Andrews (2004), agar proses efektivitas *performance based budgeting* dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan *motivational acceptance* yaitu dengan memberikan *reward* dan *punishment*. Hal ini sesuai dengan penelitian Fitri (2013), Pradana (2014) dan Prasetya (2018) yang menunjukkan bahwa *reward* dan *punishment* berpengaruh terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: *Acceptance* berpengaruh positif terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

BAB III METODOLOGI

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penelitian yang dimulai dari penyusunan proposal hingga mengolah data yang akan memberikan hasil penelitian. Penelitian ini dimulai pada Bulan November hingga selesai. Sedangkan wilayah dalam penelitian ini adalah wilayah kerja teritorial Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten yang terdiri dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (23:2017), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguji hipotesis yang ditetapkan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (136:2017), populasi merupakan wilayah generalisasi berupa subyek atau obyek dengan kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari lebih lanjut guna mengambil kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah Satuan Kerja (Satker) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten yakni Kabupaten Klaten dan Boyolali

yang terdiri 18 kementerian atau lembaga dengan jumlah 78 Satuan Kerja dan jumlah pejabat struktural 528 pejabat.

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan jumlah serta karakteristik dari populasi (Sugiyono, 137:2017). Sampel yang dipilih adalah pejabat struktural yang ikut serta dalam pengukuran kinerja dan terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran serta ikut dalam pengambilan keputusan yakni kepala bagian, kepala sub bagian, kepala seksi dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 139:2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, dimana dalam menentukan sampel tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 142:2017).

Teknik *non-probability sampling* dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (144:2017), *purposive sampling* merupakan metode pemilihan responden dengan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Pejabat yang melakukan pengukuran kinerja, karena dengan membandingkan dan mengukur kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
2. Pejabat yang ikut dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran serta ikut dalam proses pengambilan keputusan, karena ketika mereka terlibat

dalam proses tersebut maka akan lebih memahami kendala yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan anggaran serta mereka akan merasa dihargai sehingga timbul semangat dan motivasi kerja untuk melakukan sesuatu yang terbaik guna kepentingan organisasi.

3.5 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Menurut Sugiyono (2019:2017), sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer akan diperoleh peneliti secara langsung dari responden melalui jawaban kuisisioner. Kuisisioner digunakan peneliti untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2017:225). Penelitian ini menggunakan kuisisioner, dimana pertanyaan atau pernyataan diberikan kepada responden kemudian responden akan memberikan tanda centang (*checklis*) pada kolom yang telah disediakan dan diukur menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan 5 poin skala likert yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu/Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.7 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas *Performance Based Budgeting* (PBB).

2. Variabel Independen

Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Ability* (AB), *Legitimacy* (LG), dan *Acceptance* (AC).

3.8 Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel penelitian ini, maka variabel-variabel didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Item pertanyaan
1.	<i>Ability</i> . <i>Ability</i> adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan berbagai pekerjaan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini yakni kemampuan dalam mengukur kinerja organisasi, meningkatkan kualitas organisasi serta mengembangkan sistem untuk mengumpulkan informasi yang akurat serta menyediakan data base secara umum dengan format yang sesuai untuk berbagai pengguna. Andrews (2004)	1. Kemampuan penilaian kinerja	AB1
			AB2
			AB3
		2. Kemampuan Sumber daya manusia	AB4
			AB5
		3. Kemampuan teknis <i>Rizaldi (2016)</i>	AB6
	AB7		
2.	<i>Legitimacy</i> . <i>Legitimacy</i> merupakan mekanisme otorisasi pada pemerintahan dimana apabila terjadi perbedaan antara perubahan sistem dengan hukum yang berlaku serta kewenangan manajer untuk mengukur kinerja masih menggunakan penganggaran	1. Otoritas hukum	EL1
			EL2
		2. Otoritas prosedural	EL3
			EL4
		3. Otoritas organisasi <i>Rizaldi (2016)</i>	EL5
			EL6

	berbasis input maka akan menghambat pengimplementasian <i>performance based budgeting</i> . Pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya sangat mungkin dipengaruhi oleh otoritas hukum, yang tidak memerhatikan informasi penilaian kinerja sehingga dapat mengurangi wewenang yang dimiliki organisasi. Andrews (2004)		
3.	<i>Acceptance</i> . <i>Acceptance</i> merupakan dukungan untuk menyukseskan penerapan sistem baru dengan meyakinkan pejabat pemerintah, manajer dan pegawainya dalam efektivitas <i>performance based budgeting</i> . Andrews (2004)	1. Dukungan politis 2. Dukungan administrative 3. Dukungan motivasi <i>Rizaldi (2016)</i>	EA1 EA2 EA3 EA4 EA5
4.	Efektivitas <i>Performance Based Budgeting</i> . Efektivitas <i>Performance Based Budgeting</i> adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan dengan Visi, Misi serta rencana strategi organisasi. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau <i>output</i> dari perencanaan alokasi biaya atau <i>input</i> yang ditetapkan. Anggaran kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan <i>outcome</i> yang telah diantisipasi. Bastian (2006)	1. Capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> . 2. Efektif dan efisien <i>Prasetya (2018)</i>	PBB1 PBB2 PBB3 PBB4 PBB5

3.9 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 (*Statistical Package For Social Sciences 25*). Penelitian menguji beberapa uji statistik, berikut analisis data yang dilakukan:

3.9.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran umum dari data yang terkumpul untuk dianalisis dengan melihat nilai *mean*, *standar deviasi*, *varian*, *maximum*, *minimum*, *sum*, *range*, serta *kurtosis*. Data yang disajikan dalam statistik deskriptif berasal dari jawaban kuisisioner para responden, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sampel penelitian serta memberikan deskripsi mengenai variabel dalam penelitian (Ghozali, 2018).

3.9.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu :

1. Uji Validitas

Uji validasi dilakukan dengan alat statistik yaitu program SPSS 25. Menurut Ghozali (2018), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya data kuisisioner, sehingga dapat diketahui apakah pertanyaan kuisisioner tersebut tepat untuk diukur. Pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid jika mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner.

Cara menguji validitas yaitu dengan mengoreksi skor butir pertanyaan dengan skor total variabel, atau dengan melihat r -hitung dan r -tabel dari hasil ujinya. Uji validitas dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan memiliki nilai positif. Nilai r_{tabel} diperoleh dari $Df = N-2$, dengan tingkat signifikan 0,05 uji dua arah.

2. Uji Reabilitas

Kuisisioner dikatakan reliabel apabila hasil kuisisioner dinyatakan stabil dan konsisten (*Cronbach Alpha* > 0,70). Pengukuran hanya sekali saja untuk mengukur reliabilitas, yang dilihat dari nilai koefisien *cronbach alpha* (Ghozali, 2018).

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah dalam model regresi, variabel pengganggu terdistribusi secara normal atau tidak. Cara mengetahui normal tidaknya distribusi data yaitu menggunakan metode One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test. Oleh karena itu peneliti menggunakan taraf signifikansi dari nilai Kolmogorov-Smirnov $> 5\%$, artinya data yang digunakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Dikatakan baik atau tidak terjadi masalah apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya multikolinieritas bisa dilihat pada *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance Value* $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 maka model tersebut bebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model tersebut terjadi ketidaksamaan *variance* dari suatu residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dikatakan baik apabila model regresinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah metode Glejser Test yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen, sehingga dapat

diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikan (p-value) variabel independe $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.9.4 Uji Kelayakan Model

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi tersebut menerangkan variabel dependen. Nilai R^2 ditunjukkan antara nol dan satu. Apabila R^2 mendekati nilai satu, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Statistik F (Simultan)

Uji Statistik F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan atau bersama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dikatakan hipotesis diterima atau signifikan, apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan/atau nilai *probabilitas signifikan* $< 0,05$ (Ghozali, 2018).

3.9.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan (simultan) ataupun secara parsial, serta digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 AB + \beta_2 LG + \beta_3 AC + \varepsilon$$

Dimana :

Y = efektivitas *performance based budgeting*

α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= efektivitas <i>performance based budgeting</i>
AB	= <i>Ability</i>
LG	= <i>Legitimacy</i>
AC	= <i>Acceptance</i>
ϵ	= eror

3.9.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji statistik t (uji signifikan parameter individual). Dimaksudkan untuk melihat apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (dependen), dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima (Ghozali, 2018).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini diawali dengan peneliti berkunjung ke KPPN Klaten pada bulan November 2020 untuk memastikan pihak KPPN mengizinkan untuk dilakukan penelitian. Tahap selanjutnya pembuatan surat ijin penelitian dari universitas pada tanggal 6 Januari 2021 untuk ditujukan kepada kepala KPPN Klaten. Setelah surat dari universitas sudah jadi, peneliti kembali berkunjung ke KPPN Klaten untuk menyerahkan surat formal dan meminta jumlah data Satuan Kerja (Satker), data pejabat struktural satker, data penyerapan anggaran, dan evaluasi *performace based budgeting* pada satker di lingkup kerja KPPN Klaten.

Pada tanggal 15 Maret 2021, peneliti menghubungi pihak MSKI KPPN Klaten untuk meminta saran supaya responden segera mengisi kuisisioner yang sudah disebar. Hari selanjutnya, peneliti berkunjung ke KPPN Klaten dan diberitahu bahwa KPPN Klaten sedang mengadakan acara Gugus Kembali Mutu (GKM) di kantor tersebut. Pihak Manajemen Satuan Kerja Internal meminta peneliti untuk mencetak kuisisionernya supaya bisa langsung di isi oleh satker yang datang mengikuti acara GKM.

Peneliti mencetak atau menyerahkan kuisisioner pada pihak MSKI KPPN Klaten sebanyak 76 kuisisioner. Pengambilan kuisisioner dilakukan dua hari setelah penyerahan yaitu pada tanggal 18 Maret 2021. Pengambilan kuisisioner dilakukan dengan membuat janji bertemu dengan pihak MSKI karena kondisi kantor yang menerapkan sebagian pegawai harus bekerja dari rumah (*Work From Home*).

Berikut data penyebaran kuisisioner pada satker di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten:

Tabel 4. 1
Data Penyebaran Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner disebar	76	100%
Kuisisioner kembali	60	78,94%
Kuisisioner tidak kembali	16	21%
Kuisisioner cacat/tidak dapat diolah	10	13,15%
Kuisisioner dapat diolah	50	65,78%

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kuisisioner tersebar sebanyak 76 kuisisioner, kuisisioner yang kembali sebanyak 60 kuisisioner (78,94%) sisanya sebanyak 16 kuisisioner (21%) yang tidak kembali. Adapun sebanyak 10 kuisisioner (13,15%) tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria. Sehingga kuisisioner yang dapat diolah hanya 50 kuisisioner (65,78%).

Tidak kembalinya semua kuisisioner dikarenakan acara Gugus Kembali Mutu (GKM) pada sesi pertama tidak seluruh satker mengisi kuisisioner dan ada beberapa satker yang tidak menghadiri acara tersebut. 10 kuisisioner tidak dapat diolah karena pengisian yang tidak lengkap dan tidak memenuhi kriteria responden yakni pejabat yang melakukan pengukuran kinerja dan pejabat yang ikut dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran serta ikut dalam proses pengambilan keputusan. Maka sebanyak 50 kuisisioner yang selanjutnya akan diolah.

Adapun distribusi karakteristik responden yang telah diperoleh dari kuisisioner yang telah disebar terdiri dari jenis kelamin, usia, jabatan, pendidikan, terlibat dalam pengukuran kinerja, dan yang ikut dalam proses perencanaan serta pengelolaan anggaran sekaligus ikut dalam proses pengambilan keputusan.

Kemudian datayang diperoleh ditabulasikan untuk didiskripsikan, berikut demografi responden dari penelitian ini:

Tabel 4. 2
Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jenis Kelamin:		
	Laki-Laki	40	67%
	Perempuan	15	25%
	Tidak Memberi Keterangan	5	8%
	Jumlah Responden	60	100%
2	Usia Responden:		
	20-30	5	8%
	31-40	13	22%
	>40	31	52%
	Tidak Memberi Keterangan	11	18%
	Jumlah Responden	60	100%
3	Jabatan:		
	Kepala Bagian	5	8%
	Kepala Sub Bagian	16	27%
	Kepala Seksi	24	40%
	Lain-Lain	5	8%
	Tidak Memberi Keterangan	10	17%
	Jumlah Responden	60	100%
4	Pendidikan:		
	SMK/SMA	0	0%
	D3	5	8%
	S1	22	37%
	S2	25	42%
	Tidak Memberi Keterangan	8	13%
	Jumlah Responden	60	100%
5	Terlibat dalam pengukuran kinerja:		
	Ya	55	91,6%
	Tidak	3	5%
	Tidak Memberi Keterangan	2	3,4%
	Jumlah Responden	60	100%
6	Terlibat dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan:		
	Ya	54	90%

	Tidak	4	6,6%
	Tidak Memberi Keterangan	2	3,4%
	Jumlah Responden	60	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki lebih mendominasi yaitu sebanyak 40 responden (67%) sedangkan responden perempuan sebanyak 15 responden (25%) dan sisanya sebanyak 5 responden (8%) tidak memberikan jawaban. Responden dengan usia di atas 40 tahun jumlahnya paling banyak yaitu 31 responden (52%), kemudian responden dengan usia antara 31-40 tahun ada sebanyak 13 responden (22%) dan sebanyak 5 responden (8%) usia diantara 20-30 tahun. Sebanyak 11 responden (18%) tidak memberikan jawaban.

Karakteristik responden berdasarkan jabatan diketahui bahwa jabatan kepala bagian sebanyak 5 responden (8%), kepala sub bagian sebanyak 16 responden (27%), kepala seksi sebanyak 24 responden (40%), dan lain-lain sebanyak 5 responden (8%), dan sisanya sebanyak 10 responden (17%) tidak memberikan jawaban.

Karakteristik responden dilihat dari tingkat pendidikannya yaitu responden dengan tingkat S2 lebih mendominasi sebanyak 25 responden (42%), kemudian disusul S1 sebanyak 22 responden (37%), dilanjutkan tingkat pendidikan diploma sebanyak 5 responden (8%) dan SMA/SMK sebanyak 0 responden (0%). Sedangkan sisanya sebanyak 8 responden (13%) tidak memberikan jawaban.

Karakteristik responden dilihat dari pejabat yang terlibat dalam pengukuran kinerja. Hasil dari jawaban responden yang terlibat dalam pengukuran kinerja sebanyak 55 responden (91,6%) sedangkan sebanyak 3 responden (5%) tidak

terlibat dalam pengukuran kinerja. Sisanya 2 responden (3,4%) tidak memberikan jawaban.

Sedangkan untuk karakteristik responden dilihat dari pejabat yang terlibat dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan yaitu sebanyak 54 responden (90%) menjawab “YA”, dan sebanyak 4 responden (6,6%) menjawab “TIDAK” yang artinya pejabat tersebut tidak mengikuti proses penganggaran serta pengambilan keputusan. Sedangkan sisanya 2 responden (3,4%) tidak memberikan jawaban.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan mengenai hasil olahan data kuisisioner yang terdiri dari nilai *mean*, *median*, *min*, *max*, dan *standard deviation*. Hasil uji statistic dengan SPSS 25 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Ability	50	21	35	29,60	3,637
Legitimacy	50	14	30	23,86	3,785
Acceptance	50	15	25	21,46	2,541
Efektivitas_Performance_based_budgeting	50	15	25	21,78	2,550
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil pengolahan data dari jawaban responden diketahui bahwa setiap variabel dinilai skala likert 1 sampai 5. Dari table diatas dapat diketahui bahwa terdapat 50 responden. Dari tabel 4.3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Ability*

Variabel *Ability* terdiri dari 7 item pertanyaan yaitu AB1 sampai AB7. Nilai *minimum* dari variabel *ability* adalah 21 dan nilai *maximumnya* adalah 35, sedangkan untuk nilai *mean* adalah 29,60. Kemudian untuk nilai *Standard Deviation* dari variabel *Ability* adalah 3,637.

2. *Legitimacy*

Variabel *Legitimacy* terdiri dari 6 item pertanyaan yaitu LG1 sampai LG6. Nilai *minimum* dari variabel *Legitimacy* adalah 14 dan nilai *maximumnya* adalah 30, sedangkan untuk nilai *mean* adalah 23,86. Kemudian untuk nilai *Standard Deviation* dari variabel *Legitimacy* adalah 3,785.

3. *Acceptance*

Variabel *Acceptance* terdiri dari 5 item pertanyaan yaitu AC1 sampai AC5. Nilai *minimum* dari variabel *Acceptance* adalah 15 dan nilai *maximumnya* adalah 25, sedangkan untuk nilai *mean* adalah 21,46. Kemudian untuk nilai *Standard Deviation* dari variabel *Acceptance* adalah 2,541.

4. Efektivitas *Performance Based Budgeting*

Variabel efektivitas *performance based budgeting* terdiri dari 5 item pertanyaan yaitu PBB1 sampai PBB5. Nilai *minimum* dari variabel efektivitas *performance based budgeting* adalah 15 dan nilai *maximumnya* adalah 25, sedangkan untuk nilai *mean* adalah 21,78. Kemudian untuk nilai *Standard Deviation* dari variabel efektivitas *performance based budgeting* adalah 2,550.

4.2.2 Uji Instrumen Penelitian

Hasil pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas untuk memastikan bahwa setiap indikator kuisioner yang digunakan dalam penelitian telah valid atau dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai R_{tabel} dengan R_{hitung} . Dimana keputusan yang diambil adalah nilai korelasi $R_{hitung} > R_{tabel}$, maka data dinyatakan valid.

Nilai R_{tabel} dihitung dengan rumus $Df = n - k$. Dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Diperoleh nilai $Df = 50 - 3 = 47$ dengan nilai $alpha$ 0,5. Sehingga nilai R_{tabel} **0,281** dan hasil uji validitas data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
<i>Ability</i>	AB1	0,893	0,281	Valid
	AB2	0,888	0,281	Valid
	AB3	0,848	0,281	Valid
	AB4	0,847	0,281	Valid
	AB5	0,867	0,281	Valid
	AB6	0,871	0,281	Valid
	AB7	0,811	0,281	Valid
<i>Legitimacy</i>	LG1	0,836	0,281	Valid
	LG2	0,803	0,281	Valid
	LG3	0,910	0,281	Valid
	LG4	0,844	0,281	Valid
	LG5	0,705	0,281	Valid
	LG6	0,770	0,281	Valid
<i>Acceptance</i>	AC1	0,791	0,281	Valid
	AC2	0,908	0,281	Valid
	AC3	0,899	0,281	Valid
	AC4	0,896	0,281	Valid
	AC5	0,718	0,281	Valid
<i>Efektivitas Performance Based Budgeting</i>	PBB1	0,921	0,281	Valid

	PBB2	0,919	0,281	Valid
	PBB3	0,938	0,281	Valid
	PBB4	0,834	0,281	Valid
	PBB5	0,938	0,281	Valid

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji validitas dari data penelitian yang memperlihatkan bahwa indikator variabel AB, LG, AC, dan PBB secara keseluruhan memiliki nilai koefisien korelatif R_{hitung} yang lebih besar dari R_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tujuan dari pengujian reliabilitas adalah untuk menilai ketepatan alat ukur yang digunakan apabila dilakukan pengukuran secara berulang. Kriteria uji reliabilitas yaitu apabila nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan nilai $> 0,70$. Dibawah ini merupakan hasil pengolahan data dari uji reliabilitas:

Tabel 4.5
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<i>Ability</i>	0,801	Reliabel
<i>Legitimacy</i>	0,801	Reliabel
<i>Acceptance</i>	0,813	Reliabel
Efektivitas <i>Performance Based Budgeting</i>	0,827	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa nilai *cronbach's Alpha* dari variabel *Ability* adalah 0,801. Nilai *cronbach's Alpha* dari variabel *Legitimacy* adalah 0,801. Nilai *cronbach's Alpha* dari variabel *Acceptance* adalah 0,813. Sedangkan untuk nilai *cronbach's Alpha* dari variabel efektivitas *Performance based budgeting* adalah 0,827. Diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,70. Sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Hasil pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov.

Berikut hasil uji normalitas data yang telah dilakukan:

Tabel 4. 6
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,80570835
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,072
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.6 di atas nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang telah diolah dinyatakan normal atau tidak terjadi masalah normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Pada penelitian ini uji multikolonieritas melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka data tidak ada masalah multikolonieritas. Berikut ini hasil uji statistik multikolonieritas data penelitian:

Tabel 4. 7
Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,330	2,632		1,645	,107		
	Ability	,321	,103	,458	3,113	,003	,505	1,981
	Legitimacy	,032	,101	,048	,316	,753	,482	2,073
	Acceptance	,335	,120	,334	2,791	,008	,761	1,313

a. Dependent Variable: Efektivitas_Performance_based_budgeting

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji multikolonieritas dengan nilai *tolerance* dan VIF dari variabel *ability* adalah 0,505 dan 1,981. Untuk variabel *legitimacy* dengan nilai *tolerance* 0,482 dan nilai VIF 2,073. Sedangkan untuk variabel *acceptance* nilai *tolerancenya* sebesar 0,761 dan nilai VIF sebesar 1,313. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel $> 0,1$ dan nilai VIF seluruh variabel < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terjadi masalah multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan adalah uji *Rank Glejser*. Keputusan diambil jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

Berikut hasil analisis data penelitian:

Tabel 4. 8
Uji Rank Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,133	1,613		1,322	,193
	Ability	,072	,063	,222	1,133	,263
	Legitimacy	-,140	,062	-,452	-2,252	,029
	Acceptance	,021	,074	.,045	,283	,779

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji *rank Glejser* pada tabel 4.8 diatas memperlihatkan nilai signifikansi variabel *ability* sebesar 0,263, nilai signifikansi *legitimacy* sebesar 0,029 dan nilai signifikansi *acceptance* sebesar 0,779. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *ability* dan *acceptance* lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sedangkan variabel *legitimacy* nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang artinya terjadi masalah heterokedastisitas.

Untuk mengatasi masalah heterokedastisitas tersebut, peneliti menggunakan uji selanjutnya yakni uji *park*. Berikut hasil dari analisis data peneliti:

Tabel 4. 9
Uji Park

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,973	3,589		,271	,787
	Ability	,030	,140	,042	,213	,833
	Legitimacy	-,265	,138	-,386	-1,921	,061
	Acceptace	,186	,164	,182	1,136	,262

a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber : Data diolah, 2021

Hasil uji *park* pada tabel 4.9 diatas memperlihatkan nilai signifikansi variabel *ability* sebesar 0,833, nilai signifikansi *legitimacy* sebesar 0,061 dan nilai signifikansi *acceptance* sebesar 0,262. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Kelayakan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat model dapat menerangkan variasi model dependen. Nilai R^2 yang baik adalah yang mendekati 1 (satu) karena variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen. Hasil pengujian data diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,706 ^a	,498	,466	1,864
a. Predictors: (Constant), Acceptance, Ability, Legitimacy				

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.9 di atas besarnya R^2 yaitu sebesar 0,466 atau 46%. Hal ini mengandung arti bahwa variabel *ability*, *legitimacy*, dan *acceptance* dapat menjelaskan variabel efektivitas *performance based budgeting* sebesar 46%, sedangkan sisanya sebesar 54% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (*ability*, *legitimacy*, dan *acceptance*) terhadap variabel dependen (efektivitas *performance based budgeting*) secara bersama-sama atau secara simultan. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Berikut hasil uji signifikansi simultan dengan SPSS 25:

Tabel 4. 11

Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158,811	3	52,937	15,241	,000 ^b
	Residual	159,769	46	3,473		
	Total	318,580	49			
a. Dependent Variable: Efektivitas_Performance_based_budgeting						
b. Predictors: (Constant), Acceptance, Ability, Legitimacy						

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 4.10 ANOVA diatas memperlihatkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) diperoleh nilai F sebesar 15,241 dengan probabilitas sebesar 0,000. F_{tabel} diperoleh $Df = 3$. Nilai $Df_2 = 50-3-1 = 46$. Maka nilai F_{tabel} adalah **2,81**. Jika dilihat dari nilai F_{tabel} maka menunjukkan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($15,241 > 2,81$). Sedangkan nilai signifikansi menunjukkan bahwa $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel *ability*, *legitimacy*, dan *acceptance* secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat arah hubungan variabel *ability*, *legitimacy* dan *acceptance* terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Analisis regresi inier berganda dapat dilihat dari tabel *coefficient*. Hasil uji SPSS 25 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,330	2,632		1,645	,107
	Ability	,321	,103	,458	3,113	,003
	Legitimacy	,032	,101	,048	,316	,753
	Acceptance	,335	,120	,334	2,791	,008
a. Dependent Variable: Efektivitas_Performance_based_budgeting						

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 *coefficient* di atas, nilai konstanta sebesar 4,330 dan nilai β untuk variabel *ability* (AB) sebesar 0,321 , *legitimacy* (LG) sebesar 0,032, dan *acceptance* (AC) sebesar 0,335. Sehingga persamaan regresi dari tabel di atas adalah:

$$PBB = 4,330 + 0,321 AB + 0,031 LG + 0,335 AC + 0,46$$

Persamaan regresi linier berganda di atas mengandung arti:

1. Nilai konstanta sebesar 4,330 mengandung arti jika variabel *ability* (AB), *legitimacy* (LG), dan *acceptance* (AC) dianggap konstan, maka *performance based budgeting* (PBB) bernilai 4,330.
2. Koefisien regresi *ability* sebesar 0,321 mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan *ability* sebesar 1, maka diikuti kenaikan *performance based budgeting* sebesar 0,321 atau 32,1% dengan asumsi semua variabel bebas yang lainnya adalah tetap.
3. Koefisien regresi *legitimacy* sebesar 0,031 mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan *legitimacy* sebesar 1, maka diikuti kenaikan *performance based budgeting* sebesar 0,031 atau 3,1% dengan asumsi semua variabel bebas yang lainnya adalah tetap.
4. Koefisien regresi *acceptance* sebesar 0,335 mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan *acceptance* sebesar 1, maka diikuti kenaikan *performance based budgeting* sebesar 0,335 atau 33,5% dengan asumsi semua variabel bebas yang lainnya adalah tetap.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengkonfirmasi hipotesis yang telah diturunkan. Pengujian hipotesis dilihat dari uji signifikan parameter individu.

Hasil dari pengujian hipotesis dengan SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,330	2,632		1,645	,107
	Ability	,321	,103	,458	3,113	,003
	Legitimacy	,032	,101	,048	,316	,753
	Acceptance	,335	,120	,334	2,791	,008

a. Dependent Variable: Efektivitas_Performance_based_budgeting

Sumber: Data diolah, 2021

Nilai T_{hitung} $Df = 50-4 = 46$ dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai T_{tabel} **2,012**. Berdasarkan hasil output SPSS 25 di atas T_{hitung} dari variabel *ability* (AB) adalah 3,113 dimana nilai tersebut lebih besar dari T_{tabel} ($3,113 > 2,012$) dengan signifikansi $0,003 < 0,05$. Maka hipotesis 1 diterima, yang artinya variabel *ability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Nilai T_{tabel} dari variabel *legitimacy* (LG) adalah sebesar 0,316. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,316 < 2,012$ dimana $T_{hitung} < T_{tabel}$. Untuk nilai signifikansinya diperoleh 0,753 yang menunjukkan bahwa nilai *sig.* $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-2 ditolak, dimana variabel *legitimacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Nilai T_{tabel} dari variabel *acceptance* (AC) adalah sebesar 2,791. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $2,791 > 2,012$ dimana $T_{hitung} > T_{tabel}$. Untuk nilai

signifikansinya diperoleh 0,008 yang menunjukkan bahwa nilai $sig. < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-3 diterima, dimana variabel *acceptance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Ability terhadap Efektivitas Performance Based Budgeting

Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis pertama terbukti secara statistik bahwa *ability* (AB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. *Ability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja KPPN Klaten dengan nilai T_{hitung} sebesar 3,113. Nilai tersebut lebih besar dari T_{tabel} ($3,113 > 2,012$) dengan nilai *signifikansi* yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa *ability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja KPPN Klaten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shabrina (2020) yang menyatakan bahwa *ability* berpengaruh positif terhadap efektivitas *Performance based budgeting*. Fitri, *et al.* (2013), Madjid dan Ashari(2013), Asikin (2014), nawastri (2015), Hotdianty (2016), Rizaldi (2016), Prasetya (2018) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Asikin (2014), Nawastri (2015), dan Shabrina (2020) yang menemukan bahwa sistem informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas *Performance based budgeting*.

Dilihat dari jawaban kuisioner responden pada variabel *ability* menunjukkan rata-rata jawaban yang tinggi yakni 4,22 (setuju). Rata-rata jawaban efektivitas *performance based budgeting* juga menunjukkan nilai yang tinggi yakni 4,35 (setuju). Artinya, semakin tinggi *ability* yang dimiliki satuan kerja di lingkup kerja KPPN Klaten maka akan meningkatkan efektivitas *performance based budgeting*.

Bukti hipotesis pertama diterima dapat dilihat dari jawaban responden pada indikator pertanyaan penilaian kinerja, rata-rata jawaban yakni 4,32 (setuju). Artinya, satuan kerja telah memahami bagaimana kaitan *output* terhadap *outcome* yang ingin dicapai dan menggunakan informasi *output* atau *outcome tersebut* untuk menilai kinerja. Satuan kerja juga menggunakan informasi kinerja yang akurat.

Bukti selanjutnya dilihat dari jawaban responden pada indikator sumber daya manusia yakni 4,21 yang menunjukkan rata-rata jawaban setuju. Artinya sebagian besar responden menyatakan bahwa satuan kerja masing-masing telah memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menerapkan efektivitas *performance based budgeting*. Namun menurut manajemen satuan kerja internal KPPN Klaten menyatakan bahwa tidak sedikit satker yang masih membutuhkan peningkatan disebabkan pegawai yang terlibat dalam perencanaan anggaran masih baru, sehingga pihak MSKI mengadakan pelatihan-pelatihan supaya SDM pada satuan kerja memadai.

Bukti selanjutnya dilihat dari jawaban responden pada indikator kemampuan teknis, sebagian besar menyatakan setuju dengan rata-rata 4,1. Artinya satuan kerja sudah memiliki sistem informasi yang digunakan untuk melakukan

perencanaan dan pengelolaan anggaran. Namun, dalam web binar KPPN Klaten menyatakan bahwa penyusunan anggaran tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penerapan sistem baru. KPPN Klaten menyadari bahwa penerapan sistem tersebut perlu upaya pendampingan kepada setiap satker pengelola APBN agar tujuan dan manfaatnya tercapai.

4.3.2 Pengaruh Legitimacy terhadap Efektivitas Performance Based Budgeting

Dari segi *legitimacy* (LG), hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *legitimacy* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. *Legitimacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja KPPN Klaten dengan nilai T_{hitung} sebesar 0,316. Nilai tersebut lebih kecil dari T_{tabel} ($0,316 < 2,012$) dengan nilai *signifikansi* yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,753. Hal ini menunjukkan bahwa *legitimacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja KPPN Klaten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri et.al (2013) yang menyatakan bahwa otoritas organisasi dan otoritas hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Rizaldi (2016), Madjid dan Ashari (2013) menyatakan bahwa otoritas hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Rizaldi (2016) menyatakan bahwa otoritas prosedural tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Dilihat dari jawaban kuisisioner responden pada variabel *legitimacy* menunjukkan rata-rata jawaban kurang dari nilai 4 yakni 3,97. Sedangkan rata-rata jawaban efektivitas *performance based budgeting* menunjukkan nilai yang tinggi yakni 4,35 (setuju). Artinya, ketika variabel *legitimacy* memiliki nilai yang rendah maka tidak mempengaruhi efektivitas *performance based budgeting*.

Bukti bahwa *legitimacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* dapat dilihat melalui hasil jawaban responden. Nilai minimum dari *legitimacy* sebesar 14 artinya menunjukkan rata-rata jawaban 2,33. Nilai minimum tersebut dimiliki oleh responden ke 11. Kemudian nilai rata-rata responden dari jawaban variabel efektivitas *performance based budgeting* yaitu 4.

Selanjutnya nilai maximum dari *legitimacy* sebesar 30 yang artinya menunjukkan rata-rata jawaban 5 (sangat setuju). Nilai tersebut dimiliki oleh responden ke 1,4,34,39,46,49. Kemudian untuk variabel *performance based budgeting* memiliki rata-rata jawaban yang tinggi yakni 4,73. Maka dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya *legitimacy* yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkup kerja KPPN Klaten, tidak berpengaruh terhadap efektivitas *performance based budgeting*.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban pada indikator pertanyaan otoritas hukum, sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju dengan rata-rata 4,16. Artinya responden merasa telah menerapkan peraturan terkait efektivitas *performance based budgeting* dengan baik. Responden menyetujui bahwa peraturan terkait efektivitas *performance based budgeting* telah mengarahkan orientasi pada *output* dan *outcome*.

Namun, jika dilihat dari jawaban responden pada indikator pertanyaan otoritas prosedural rata-rata jawaban 3,94. Artinya ada beberapa responden yang menjawab netral atau ragu-ragu dan ada beberapa yang menjawab tidak setuju. Menurut Manajemen Satuan Kerja Internal KPPN Klaten, prosedur yang ada sudah mendukung efektivitas *performance based budgeting*. Prosedur tersebut sudah memberikan kewenangan kepada satker untuk menggunakan informasi kinerja proses anggaran. Namun, penggunaan informasi tersebut belum dilakukan secara maksimal.

Sedangkan untuk rekapitulasi jawaban pada indikator otoritas organisasi, rata-rata jawaban yakni 3,83. Artinya, masih ada beberapa satuan kerja yang merasa belum sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran serta mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan satker. Menurut Manajemen Satuan Kerja Internal KPPN Klaten, kurangnya kewenangan satker terlihat pada ketidaksesuaian antara usulan anggaran yang diajukan oleh satker dengan anggaran yang diterima.

Ketidaksesuaian usulan anggaran dengan anggaran yang diterima tersebut hanya terjadi pada jumlah anggaran, sedangkan dari segi output usulan yang diajukan disetujui. Hal tersebut menimbulkan masalah karena *output* yang diusulkan tetap, namun anggaran untuk mencapai *output* tersebut dikurangi. Dampaknya adalah komponen-komponen anggaran berubah karena perencanaan harus dibuat ulang untuk menyesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia.

4.3.3 Pengaruh *Acceptance* terhadap Efektivitas *Performance Based Budgeting*

Pengujian hipotesis yang terakhir, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *acceptance* berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Dengan demikian, hipotesis terakhir diterima. *Acceptance* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja KPPN Klaten dengan nilai T_{hitung} sebesar 2,791. Nilai tersebut lebih kecil dari T_{tabel} (2,791 > 2,012) dengan nilai *signifikansi* yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa *acceptance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja KPPN Klaten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizaldi (2016) yang menyatakan bahwa dukungan politik berpengaruh positif terhadap *Performance based budgeting*. Naseri (2014) yang menyatakan bahwa *administrative acceptance* berpengaruh terhadap efektivitas *performance based budgeting*. Fitri (2013), Pradana (2014) dan Prasetya (2018) yang menunjukkan bahwa *reward* dan *punishment* berpengaruh terhadap *performance based budgeting*.

Bukti bahwa hipotesis terakhir diterima dapat dilihat dari jawaban kuisisioner responden pada variabel *acceptance* menunjukkan rata-rata jawaban 4,29 yakni setuju. Sedangkan rata-rata jawaban efektivitas *performance based budgeting* menunjukkan nilai yang tinggi yakni 4,35 (setuju). Artinya, ketika satuan kerja di lingkup kerja KPPN Klaten mendapatkan *acceptance* dari para pemimpin atau

dukungan politis, dukungan administratif serta motivasi maka akan meningkatkan efektivitas *performance based budgeting*.

Manajemen Satuan Kerja Internal KPPN Klaten menyatakan bahwa lembaga legislatif telah mendukung efektivitas *performance based budgeting*. Namun, dukungan tersebut masih perlu ditingkatkan karena beberapa *output* tidak disetujui dan anggarannya dipindahkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai perencanaan kementerian atau lembaga.

Sedangkan sistem penghargaan dan sanksi, sistem tersebut sudah ada untuk efektivitas *performance based budgeting*. Namun. Sistem tersebut baru diberikan untuk kementerian atau lembaga. Sebelum penyerahan DIPA Satker lingkup KPPN Klaten, diserahkan pula penghargaan bagi Satker dengan peringkat IKPA terbaik di lingkup KPPN klaten.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dari pengaruh *ability*, *legitimacy* dan *acceptance* terhadap efektivitas *performance based budgeting* di Satuan Kerja lingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Klaten dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Klaten.
2. *Legitimacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Klaten.
3. *Acceptance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas *performance based budgeting* pada Satker di lingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri Klaten.

5.2 Keterbatasan Penulis

Berikut keterbatasan dari penelitian ini:

1. Dalam penyebaran kuisioner penelitian, kuisioner seluruhnya dititipkan melalui pihak Manajemen Satuan Kerja Internal di KPPN Klaten, karena pada saat penyerahan sedang berlangsung acara GKM yang diadakan oleh seksi MSKI KPPN Klaten. Peneliti tidak dapat bertemu secara langsung dengan responden dan mendampingi responden dalam pengisian kuisioner. Sehingga, ada kemungkinan responden kurang memahami maksud dari setiap pertanyaan kuisioner yang diberikan sehingga jawaban secara asal.

2. Kuisisioner yang disebarakan tidak dapat semuanya kembali, hal ini disebabkan sebagian Satuan Kerja menerapkan sistem *Work From Home* (WFH) akibat adanya Pandemi Covid-19.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel *ability*, *legitimacy* dan *acceptance* yang menjelaskan variabel *performance based budgeting* dengan nilai masih sedikit, sehingga masih terdapat variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas *performance based budgeting*.
4. Sebagian responden tidak sepenuhnya mengisi identitas kuisisioner, sehingga menyulitkan peneliti dalam mendeskripsikan sampel penelitian dan kuisisioner menjadi tidak bisa diolah.

5.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian, diharapkan:

1. Meningkatkan *ability* baik kemampuan sumber daya manusia, kemampuan menilai kinerja dan kemampuan teknis dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan atau diklat pada satuan kerja di lingkup kerja KPPN Klaten.
2. Penggunaan kewenangan dalam otoritas organisasi perlu diterapkan secara hati-hati agar *output* yang diprioritaskan dalam perencanaan anggaran benar-benar mendukung pencapaian *outcome* dan tujuan kementerian/lembaga.
3. Dukungan politis perlu ditingkatkan melalui pengurangan pemberian dana optimalisasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *performance based budgeting*. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem penghargaan dan sanksi, supaya penghargaan tidak hanya diberikan pada kementerian atau lembaga.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel independen

untuk melihat hubungannya antara efektivitas *performance based budgeting* dan penelitian dilakukan pada objek yang berbeda sehingga hasil dari penelitian dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Matthew. 2004. Authority, Acceptance, Ability and Performance Based Budgeting Reforms. *The International Journal of Public Sector Management*.
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2018). Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran: Jakarta.
- Fahlevi, H & M.R. Ananta. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung (Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 01, No. 02.
- Fitri, Syarifah M., *et al.* (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward, dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, J.L. 2001. *Performance based budgeting in Maine*. Paper presented at the Managing Performance Conference. Baltimore. MD. 11 October.
- Hartanto, Busaini, Animah. (2018). Implementasi of Performance Based Budgeting: A Phenomonological Study on National Land Agency. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*
- Hotdianty, Hertika. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Penyempurnaan Sistem administrasi, Sumber Daya Manusia, Reward dan Punishment Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Pelalawan). *JOM Fekon*, Vol. 03, No.1.
- Kuncoro, M. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Liwaul, Rosika, Purwanti, Hamryati. (2017). Analysis of Performance Based Budgeting system Implementation in improving Organizational Effectiveness. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR- JBM)*.

- Madjid, Noor C. dan Hasan Ashari.(2013). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan).*Kajian Akademis BPPK*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mowday, R. T., Steers, R. M. dan Porter, I. W. 1979. "The Measurement of Organizational Commitment".*Journal of Vocational Behaviour*. No. 14, 224-247.
- Nanda, Reza dan Darwanis. 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). Aceh Selatan :*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No.1.
- Naseri, Ahmad, *et al.* (2014). Identification of Obstacles in Establishing The Performance- Based Budgeting System in Medical Sciences Universities of Iran Using The Shah Model. *Indian Journal of Fundamental and AppliedLife Sciences*, Vol. 5.
- Nawastri, Sabtari Abdul. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan).*Diponegoro journal of accounting*.Vol. 4, No. 2.
- Paterson, William dan Gandhi Harahap.2010. Perencanaan Pengeluaran dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada Direktorat Jenderal Bina Marga. Jakarta: Indonesia Infrastructure Initiative.
- Peraturan Menteri Keuanagn Nomor 195/PMK.06/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
- Pradana, Handayani, dan Murtini. 2014. Determinan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Pada Universitas Negeri Semarang). *Accounting Analysis Journal*.Vol 3, No. 01.
- Prasetya, Ardyan Kulit. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bima).*Indonesia Treasury Review* Vol. 3, No. 1, Hal. 1-12
- Putri, C. T. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu.Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Rahmayati, Anim. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Surakarta: Gerbang Media.

- Rizaldi, Diapinar Reza. 2016. Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta: KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. *Indonesia Treasury Review* Vol. 1, No. 3, Hal. 85-104
- Robinson, M. And J. Brumby. 2005. Does Performance Based Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature. *IMF Working Paper No. WP/05/210*. Washington, DC.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntansi dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 2, No. 2.
- Shabrina, Hafilah K. dan Sugih Sutrisno. (2020). Pengaruh Ability, Legitimacy, dan Acceptance terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Periode Tahun Anggaran 2017-2018 (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). Bandung : *Research Workshop and National Seminar*, Vol. 11, No. 01.
- Shah, Anwar. 1998. Balance, Accountability, and Responsiveness: Lesson about Decentralization. *Policy Research Working Paper*
- Sriharioto dan Ratna Wardhani. (2012). Good Governance, Kompetensi dan Persepsi Keberhasilan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *Working Paper*.
- Widyantoro, Ari Eko. 2009. Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenologis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Young, R.D. 2003. Performance based budget system. Public and Practice. An Electronic Journal Devoted to Governance and Public Policy in South Carolina. Vol.02 No.02, pp. 1-24
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id/data-publikasi/berita-terbaru/2828-webinar-kppn-klaten-ada-redesain-sistem-penganggaran-apbn-2021.html> (di akses 10 september 2020)
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/06/24/203221446878403-resmi-dpr-dukung-upaya-pemerintah-redesain-sistem-penganggaran> (di akses 10 september 2020)
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29103/t/Redesain+Penganggaran+Harus+Mudah+Dipahami+dan+Bermanfaat> (di akses 10 september 2020)

Lampiran 2 : Kuesioner**PENGARUH *ABILITY*, *LEGITIMACY*, DAN *ACCEPTANCE*
TERHADAP EFEKTIVITAS *PERFORMANCE BASED BUDGETING***

Kepada

Yth. Kepala/Pimpinan Bagian, Kepala Sub Bagian,
dan Kepala Seksi Satker di wilayah kerja
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kabupaten Klaten

Dengan Hormat,

Saya Leni Kusnul Qotimah, mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, akan melakukan penelitian tugas terakhir pada Satuan Kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten dengan judul "**Pengaruh *Ability*, *Legitimacy*, dan *Acceptance* Terhadap Efektivitas *Performance Based Budgeting***". Saya mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam memberikan jawaban sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri saya ucapkan terimakasih.

Klaten, 16 Maret 2021

Hormat Saya

(Leni Kusnul Qotimah)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden* :

Umur Responden* : tahun

Nama Satker* :

(Berikan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia)

Jenis Jabatan* : Struktural: Eselon..... Fungsional

Jabatan* : Kepala Bagian
 Kepala Sub Bagian
 Kepala Seksi
 Lain-lain :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Terlibat dalam pengukuran kinerja :

Ya Tidak

Terlibat dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan:

Ya Tidak

Pendidikan : SMP S1

SMA/SMK S2

Diploma S3

Petunjuk pengisian:

1. Sebelum menjawab setiap pertanyaan/ pernyataan, bacalah terlebih dahulu dengan baik dan benar.
2. Isilah kuisioner sesuai dengan kondisi perusahaan tempat Bapak/ Ibubekerja.
3. Pilihlah salah satu jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/ Ibu paling sesuai dengan memberi tanda check-list (√) pada pilihan yang telah disediakan.
4. Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Ragu-Ragu/Netral (N); Tidak Setuju (TS); Sangat Tidak Setuju (STS).

Kuisioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

PERTANYAAN KUISIONER

1. *Ability* (AB)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya telah memahami informasi <i>output</i> dan <i>outcome</i> .					
2.	Saya menggunakan informasi <i>output</i> atau <i>outcome</i> untuk menilai kinerja.					
3.	Saya menggunakan informasi kinerja yang akurat.					
4.	Saya mampu menentukan target kinerja.					
5.	Saya mampu mengelola data dan mengevaluasi kinerja.					
6.	Saya memiliki sistem informasi kinerja.					
7.	Informasi kinerja telah terintegrasi dengan proses penganggaran, proses akuntansi, proses monitoring, dan proses evaluasi.					

Sumber : Rizaldi (2016)

2. *Legitimacy* (EL)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya telah menerapkan peraturan terkait <i>performance based budgeting</i> dengan baik.					
2.	Peraturan terkait <i>performance based budgeting</i> mengarahkan orientasi pada <i>output/outcome</i> .					
3.	Saya memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi kinerja dalam penyusunan <i>performance based budgeting</i> .					

4.	Saya telah memanfaatkan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan.					
5.	Saya memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran.					
6.	Saya memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi.					

Sumber : Rizaldi (2016)

3. Acceptace (EA)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Implementasi anggaran berbasis kinerja mendapat dukungan dari legislative (DPR).					
2.	Kepala kantor (satker) saya mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.					
3.	Implementasi anggaran berbasis kinerja mendapat dukungan dari pimpinan satuan kerja.					
4.	Kepala satker saya menggunakan informasi kinerja dalam mengambil keputusan anggaran.					
5.	Saya mendapatkan penghargaan/ sanksi terkait pencapaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> .					

Sumber : Rizaldi (2016)

4. Efektivitas *Perfomance Based Budgeting* (PBB)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menyusun anggaran mengaitkan alokasi anggaran dengan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang diharapkan.					

2.	Saya menyusun alokasi anggaran berpedoman pada indikator kinerja yang harus dicapai.					
3.	Saya menyusun alokasi anggaran berpedoman pada standar biaya.					
4.	Saya menyusun anggaran mengutamakan penghematan biaya dalam mencapai <i>output</i> dan <i>outcome</i> .					
5.	Saya mengevaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.					

Sumber : Prasetya (2018).

Lampiran 3 : Daftar Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Klaten

No	Kementerian atau Lembaga	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Satker	Jumlah Pejabat Struktural
1.	Mahkamah Agung	097982	Pengadilan Negeri Boyolali	8	44
		099121	Pengadilan Negeri Boyolali		
		401137	Pengadilan Agama Boyolali		
		401138	Pengadilan Agama Boyolali		
		097996	Pengadilan Negeri Klaten		
		099122	Pengadilan Negeri Klaten		
		401121	Pengadilan Agama Klaten		
		401122	Pengadilan Agama Klaten		
2.	Kejaksaan Republik Indonesia	005552	Kejaksaan Negeri Boyolali	2	18
		005545	Kejaksaan Negeri Klaten		
3.	Badan Pusat Statistik	019110	Badan Pusat Statistik Kab. Boyolali	2	14
		019131	Badan Pusat Statistik Kab. Klaten		

4.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	643571	POLRES Boyolali	2	18
		643564	POLRES Klaten		
5.	Komisi Pemilihan Umum	657494	KPU Kab. Boyolali	2	10
		657480	KPU Kab. Klaten		
6.	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	107170	Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten	3	30
		404931	Rumah Tahanan Negara Boyolali		
		404950	LAPAS Klaten		
7.	Kementerian Keuangan	409592	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten	4	39
		410492	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo		
		634722	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten		
		663597	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali		
8.	Kementerian Pendidikan Nasional	427832	Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah	1	9
9.	Kementerian Kesehatan	415573	RSU Pusat Dr.Soeradji Tirtonegoro	1	7
10.	Kementerian Agama	308571	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten	46	280

		417460	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Klaten		
		424395	Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Klaten		
		573179	Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Klaten		
		598330	Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Klaten		
		598326	Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Klaten		
		661448	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Klaten		
		674661	Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Klaten		
		417527	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Boyolali		
		417533	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Boyolali		
		308607	Madrasah Tsanawiyah Negeri Boyolali		
		573162	Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Boyolali		

		573158	Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Boyolali		
		598169	Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali		
		598202	Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Boyolali		
		598194	Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Boyolali		
		598152	Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Boyolali		
		598180	Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Boyolali		
		598173	Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Boyolali		
		598216	Madrasah Tsanawiyah Negeri 12 Boyolali		
		674657	Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Boyolali		
		681219	Madrasah Tsanawiyah Negeri 14 Boyolali		
		032506	Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Boyolali		

		537187	Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten		
		417451	Madrasah Aliyah Negeri 2 Klaten		
		598457	Madrasah Aliyah Negeri 3 Klaten		
		308611	Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali		
		598401	Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali		
		662305	Madrasah Aliyah Negeri 3 Boyolali		
		662312	Madrasah Aliyah Negeri 4 Boyolali		
		417445	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		
		417446	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		
		417447	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		
		417448	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		
		417449	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		
		417450	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		
		417452	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		
		417453	Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten		

		417511	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
		417512	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
		417513	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
		417514	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
		417515	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
		417516	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
		417517	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
		417518	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali		
11.	Kementerian Ketenagakerjaan	039601	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Klaten	2	14
		039606	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Boyolali		
12.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	574317	Balai Taman Nasional Gunung Merbabu	1	10
13.	Bendahara Umum Negara	403537	KPPN Klaten Pengelolaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa	1	6

14.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	432592	Kantor Pertanahan Kab. Klaten	2	20
		432583	Kantor Pertanahan Kab. Boyolali		
15.	Kementerian Perdagangan	032544	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali	1	9
Total				78	528

Sumber :KPPN Klaten

33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	4	4	3	4	4	3	4	26
36	4	4	4	3	3	3	3	24
37	4	4	3	4	4	4	4	27
38	5	5	5	5	5	5	5	35
39	5	5	5	5	5	5	4	34
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	4	4	4	4	4	4	3	27
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	5	4	4	5	4	4	4	30
46	5	5	4	4	4	4	4	30
47	3	3	4	4	4	3	2	23
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	4	4	4	4	4	5	5	30

2. Legitimacy (LG)

NO	LG1	LG2	LG3	LG4	LG5	LG6	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	30
2	3	3	3	3	3	3	18
3	3	5	3	4	4	4	23
4	5	5	5	5	5	5	30
5	2	2	2	2	4	4	16
6	5	5	5	4	4	5	28
7	4	4	4	4	3	3	22
8	4	4	4	5	4	4	25
9	4	4	3	4	3	3	21
10	4	5	5	5	3	3	25
11	3	3	2	2	2	2	14
12	4	4	3	4	4	5	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	4	4	24

15	5	5	4	4	4	4	26
16	5	5	5	5	4	4	28
17	5	5	5	5	4	4	28
18	4	4	4	4	3	3	22
19	5	5	4	4	3	4	25
20	5	5	4	3	2	5	24
21	4	4	5	4	4	4	25
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	3	3	22
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	3	4	3	2	20
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	4	4	24
34	5	5	5	5	5	5	30
35	4	4	3	4	3	3	21
36	4	4	3	3	3	3	20
37	3	4	3	3	3	2	18
38	3	5	3	4	4	4	23
39	5	5	5	5	5	5	30
40	2	2	2	2	4	4	16
41	5	5	5	4	4	5	28
42	4	4	2	4	2	3	19
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	24
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	3	4	3	3	21
48	3	5	3	4	4	4	23
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	5	4	4	5	28

3. *Acceptance (AC)*

NO	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	TOTAL
1	5	5	5	5	5	25
2	3	3	3	3	3	15
3	5	5	5	5	4	24
4	5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	4	20
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	5	4	4	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	5	4	5	3	21
10	3	4	4	4	4	19
11	4	4	4	4	3	19
12	4	5	5	5	4	23
13	4	5	5	5	5	24
14	5	5	5	4	3	22
15	5	5	5	5	4	24
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	5	5	4	24
18	4	4	4	3	3	18
19	5	5	5	5	4	24
20	5	5	5	5	4	24
21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	3	19
23	4	4	4	4	3	19
24	4	4	4	4	3	19
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	2	18
27	5	5	4	5	4	23
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	5	5	5	4	23
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25

35	4	4	3	4	4	19
36	4	4	4	4	4	20
37	4	5	4	4	3	20
38	4	4	4	4	3	19
39	4	4	4	4	4	20
40	3	4	4	4	4	19
41	4	4	4	4	3	19
42	4	5	5	5	4	23
43	4	5	5	5	5	24
44	5	5	5	4	3	22
45	5	5	5	5	4	24
46	5	5	5	5	5	25
47	5	5	5	5	4	24
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	3	3	18
50	5	5	5	4	3	22

4. *Efektivitas Performance Based Budgeting (PBB)*

NO	PBB1	PBB2	PBB3	PBB4	PBB5	TOTAL
1	5	5	5	5	5	25
2	3	3	3	3	3	15
3	5	4	5	5	5	24
4	5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	4	20
6	5	5	5	5	5	25
7	4	4	3	3	4	18
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	5	5	5	4	4	23
11	4	4	4	4	4	20
12	4	5	4	5	4	22
13	5	5	5	4	5	24
14	4	4	4	5	4	21
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	5	5	5	25

17	5	5	5	5	5	25
18	4	4	4	4	4	20
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	5	5	4	5	23
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25
35	4	3	4	3	3	17
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	5	5	22
38	4	4	4	4	4	20
39	4	5	5	4	5	23
40	5	5	5	5	5	25
41	5	5	5	5	5	25
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	5	4	5	4	22
46	5	5	5	4	5	24
47	4	4	4	5	4	21
48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	4	4	4	20
50	5	5	5	5	5	25

– T o t a l	N	50	50	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).									

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,801	8

b. *Legitimacy*

Correlations								
		LG1	LG2	LG3	LG4	LG5	LG6	Skor_ Total
L G 1	Pearson Correlation	1	,760**	,803*	,708*	,291*	,513**	,836**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,041	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
L G 2	Pearson Correlation	,760**	1	,683*	,743*	,302*	,462**	,803**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,033	,001	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
L G 3	Pearson Correlation	,803**	,683**	1	,751*	,569*	,599**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
L G 4	Pearson Correlation	,708**	,743**	,751*	1	,527*	,413**	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,003	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
L G 5	Pearson Correlation	,291*	,302*	,569*	,527*	1	,734**	,705**
	Sig. (2-tailed)	,041	,033	,000	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
L G 6	Pearson Correlation	,513**	,462**	,599*	,413*	,734*	1	,770**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,003	,000		,000

	N	50	50	50	50	50	50	50
Skor or - T ot al	Pearson Correlation	,836**	,803**	,910*	,844*	,705*	,770**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50	50
** . Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).								
* . Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).								

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,801	7

c. Acceptance

Correlations							
		AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	Skor_ Total
A C 1	Pearson Correlation	1	,748*	,723*	,575*	,342*	,791**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,014	,000
	N	51	51	51	51	51	51
A C 2	Pearson Correlation	,748*	1	,883*	,819*	,437*	,908**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000
	N	51	51	51	51	51	51
A C 3	Pearson Correlation	,723*	,883*	1	,744*	,483*	,899**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51
A C 4	Pearson Correlation	,575*	,819*	,744*	1	,630*	,896**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	51	51	51	51	51	51

A C 5	Pearson Correlation	,342*	,437*	,483*	,630*	1	,718**
	Sig. (2-tailed)	,014	,001	,000	,000		,000
	N	51	51	51	51	51	51
S k o r - T o t a l	Pearson Correlation	,791*	,908*	,899*	,896*	,718*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	51	51	51	51	51	51
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).							

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,813	6

d. Efektivitas *Performance based budgeting*

		Correlations					
		PBB1	PBB2	PBB3	PBB4	PBB5	Skor_ Total
PB B1	Pearson Correlation	1	,799**	,899**	,677**	,829**	,921**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
PB B2	Pearson Correlation	,799**	1	,841**	,700**	,841**	,919**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
PB B3	Pearson Correlation	,899**	,841**	1	,666**	,871**	,938**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000

	N	50	50	50	50	50	50
PB B4	Pearson Correlation	,677**	,700**	,666**	1	,727**	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	50	50	50	50	50	50
PB B5	Pearson Correlation	,829**	,841**	,871**	,727**	1	,938**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	50	50	50	50	50	50
Sk or _T ota l	Pearson Correlation	,921**	,919**	,938**	,834**	,938**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).							

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,827	6

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandard ized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,8057083 5
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,072
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,330	2,632		1,645	,107		
	Ability	,321	,103	,458	3,113	,003	,505	1,981
	Legitimacy	,032	,101	,048	,316	,753	,482	2,073
	Acceptance	,335	,120	,334	2,791	,008	,761	1,313
a. Dependent Variable: Efektivitas_Performance_based_budgeting								

c. Uji Heteroskedasitas

1. Uji Rank Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,133	1,613		1,322	,193
	Ability	,072	,063	,222	1,133	,263
	Legitimacy	-,140	,062	-,452	-2,252	,029
	Acceptance	,021	,074	.,045	,283	,779
a. Dependent Variable: AbsRes						

2. Uji Park

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,973	3,589		,271	,787

	<i>Ability</i>	,030	,140	,042	,213	,833
	<i>Legitimacy</i>	-,265	,138	-,386	-1,921	,061
	<i>Acceptance</i>	,186	,164	,182	1,136	,262
a. Dependent Variable: LN_RES						

3. Uji Kelayakan Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,706 ^a	,498	,466	1,864
a. Predictors: (Constant), Acceptance, Ability, Legitimacy				

b. Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158,811	3	52,937	15,241	,000 ^b
	Residual	159,769	46	3,473		
	Total	318,580	49			
a. Dependent Variable: Efektivitas_Performance_based_budgeting						
b. Predictors: (Constant), Acceptance, Ability, Legitimacy						

4. Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,330	2,632		1,645	,107
	Ability	,321	,103	,458	3,113	,003
	Legitimacy	,032	,101	,048	,316	,753
	Acceptance	,335	,120	,334	2,791	,008
a. Dependent Variable: Efektivitas_Performance_based_budgeting						

Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KLATEN
JALAN KOPRAL SAYOM NO. 26, KLATEN; TELEPON (0272) 320445; FAKSIMILE (0272) 320443; SUREL
 EMAIL:KPPNKLATEN@GMAIL.COM; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPNKLATEN

Nomor : S-85/WPB.14/KP.10/01/2021 11 Januari 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fekon dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-055/In.10/F.IV.1/TL.00/2021 tanggal 6 Januari 2020 hal Permohonan Izin Penelitian, kami memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Program Studi	Judul Penelitian
1.	Leni Kusnul Qotimah	175221013	Akuntansi Syariah	Pengaruh ability, legitimacy, dan acceptance terhadap efektivitas performance based budgeting

untuk melaksanakan penelitian di KPPN Klaten.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kemenkeu, mahasiswa dimaksud agar menandatangani Pakta Kewajiban Menjaga Rahasia atau *Non Disclosure Agreement* (NDA) Pengendalian Aset Informasi Kemenkeu sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
 Perbendaharaan Negara Tipe A1
 Klaten



Ditandatangani secara elektronik
 Taufiq Widyantoro

Tembusan:
 Leni Kusnul Qotimah

Lampiran 7 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi:**

Nama Lengkap : LENI KUSNUL QOTIMAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 25 Juli 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jetis 02/06, Wonosari, Trucuk, Klaten
Email : lenikusnulqotimah25@gmail.com

Pendidikan:

1. SD Negeri 2 Wonosari
2. SMP Negeri 2 Trucuk
3. SMK Negeri 1 Klaten
4. IAIN Surakarta tahun 2017-2021

Lampiran 8 : Bukti Plagiasi

The screenshot displays the Turnitin Feedback Studio interface on a mobile device. At the top, the browser address bar shows 'Feedback Studio' with the URL 'https://ev.turnitin.com'. Below this, the document title 'Skripsi leni' is visible. The main content area is titled 'Match Overview' and prominently displays a '29%' match percentage. A list of eight sources is provided, each with a percentage and a right-pointing arrow for further details.

Rank	Source	Match Percentage
1	eprints.iain-surakarta.a... Internet Source	9%
2	itrev.kemenkeu.go.id Internet Source	4%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	jurnal.polban.ac.id Internet Source	1%
5	Diapinar Reza Rizaldi. "... Publication	1%
6	es.scribd.com Internet Source	1%
7	repositori.uin-alauddin.... Internet Source	1%
8	www.readbag.com Internet Source	1%

At the bottom of the screen, there is a language selection bar with 'INGGRIS' and 'INDONESIA' options, and a standard Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.